

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SUKU BUNGA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI PAPUA PADA TAHUN 2011-2021

Maria Kristiana¹
Elsyan R. Marlissa²
Yundy Hafizrianda³
yundyhafizrianda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of economic growth, interest rates, and government expenditure on tax revenue in Papua Province during the period 2011–2021. The research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis based on secondary data obtained from the Directorate General of Taxes, Statistics Indonesia, and Bank Indonesia. The results show that interest rates have a negative and significant effect on tax revenue, while government expenditure has a positive and significant effect. Meanwhile, economic growth (GRDP) does not have a significant effect on tax revenue. Simultaneously, these variables significantly influence tax revenue with a contribution of 82.4%. These findings indicate that fiscal policy through government expenditure plays an important role in increasing tax revenue, while interest rate stability needs to be maintained to support optimal state revenue.

Keywords: economic growth, interest rate, government expenditure, tax revenue

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah pembiayaan pembangunan harus mendapat banyak perhatian jika tujuan ini ingin dicapai. Lebih dari 80% pendapatan negara Republik Indonesia berasal dari perpajakan. APBN yang efektif biasanya memiliki pajak sebagai sumber pendapatan utamanya daripada hanya pengelolaan sumber daya alam karena pajak memberi pemerintah sumber daya yang dibutuhkannya untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan dengan demikian membantu mengendalikannya inflasi.

Dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memiliki hak untuk memaksa orang untuk membayar pajak. Pajak diperlukan untuk membiayai perluasan dan pengelolaan negara. Perpajakan berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa dengan harapan agar semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat puas dengan hasilnya. (Riza Faryana, 2019).

Meningkat pentingnya pajak yang memiliki konsekuensi penting, terutama karena pajak sebagai alat bagi perekonomian, dimana pendapatan yang dapat dibelanjakan, pajak sendiri memiliki dampak ganda pada perekonomian. Akibatnya, percepatan perolehan pendapatan juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dua digit. Ini termasuk pengaruhnya terhadap iklim bisnis dan anggaran berimbang yang disetujui pemerintah. (Hudiyanto, 1992).

Meita Djohan (2010) mengungkapkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk membuat orang membayar pajak, dan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak harus digunakan untuk menyelesaikan pembangunan. Hal ini merupakan salah satu hal yang mendorong pemerintah untuk memungut pajak dari penduduk. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk mendanai pertumbuhan sektor aktual yang direncanakan pemerintah. Diharapkan dengan menggali sumber-

¹ Alumni Program S2 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

sumber pendanaan dalam negeri, khususnya yang berupa pajak, upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama akan berhasil dan masyarakat dapat menikmati hasilnya.

Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah perpajakan. Pajak dalam segala jenis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fasilitas dan fasilitas negara bagi warganya. Seseorang atau badan usaha yang tunduk pada paksaan hukum harus membayar pajak sendiri kepada pemerintah, yang digunakan untuk kesejahteraan negara dan warga negaranya. Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pajak adalah pungutan negara yang diamanatkan yang diperlihatkan baik untuk warga negara pribadi maupun organisasi perusahaan. Keuntungan dari pengajuan pajak mungkin tidak langsung terlihat oleh masyarakat. Meskipun banyak orang tidak menyadarinya, pajak sebenarnya digunakan untuk membayar banyak fasilitas umum yang digunakan saat ini, termasuk rumah sakit, sekolah, angkutan umum, dan jalan raya. Ditekankan bahwa membayar pajak setara dengan membuat komitmen keuangan yang diperlukan untuk negara Anda.

Penerimaan pajak dalam negeri, atau semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan penerimaan pajak lainnya, merupakan penerimaan pajak nasional.

Milla Sepliana Setyowati (2020) menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PDB, FDI, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan badan (PPH badan). Kenaikan atau penurunan PDB dan tarif pajak akan berdampak pada kenaikan atau penurunan penerimaan pajak penghasilan badan (PPH Badan). Hal ini karena PDB dan tarif pajak memiliki hubungan yang positif dan substansial.

Penelitian lain (Nugroho, dkk, 2010) menunjukkan korelasi positif antara peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai dan peningkatan produk domestik bruto. Sisi penerimaan faktor produksi yang merupakan subjek pajak penghasilan, dan sisi pengeluaran yang merupakan subjek pajak pertambahan nilai digunakan untuk menjelaskan besarnya pertumbuhan atau penurunan produk domestik bruto suatu negara.

Selama lima tahun terakhir, perekonomian Papua terus tumbuh dan menguat. Hingga tahun 2021, PDRB Papua meningkat sebesar 15,11 persen dengan tambang dan layar dan 2,49 persen tanpa tambang. Grafik ini menunjukkan bahwa kinerja industri pertambangan yang berada di bawah merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi Papua Nugini. Kinerja sektor ini mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan tersebut dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sektor non pertambangan yang terus mengalami kontraksi setiap tahunnya sangat didukung oleh keberhasilan sektor pertambangan dan pelindung.

Tabel 1. Kontribusi PDRB ADHB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Merauke	6.87	8.36	8.00	7.01	7.56
2	Jayawijaya	3.6	4.35	4.13	3.54	3.91
3	Jayapura	6.87	8.55	8.01	7.19	7.66
4	Nabire	4.89	5.78	5.59	5.04	5.33
5	Kepulauan Yapen	1.85	2.22	2.07	1.88	2.01
6	Biak Numfor	2.45	2.86	2.61	2.3	2.56
7	Paniai	1.84	2.18	2.14	1.86	2.01
8	Puncak Jaya	0.61	0.73	0.69	0.59	0.66
9	Mimika	40.34	28.61	31.63	39.88	35.12
10	Boven Digoel	2.16	2.51	2.41	2.08	2.29
11	Mappi	1.26	1.54	1.49	1.3	1.40
12	Asmat	1.07	1.29	1.28	1.13	1.19
13	Yahukimo	1.06	1.26	1.25	1.1	1.17
14	Pegunungan Bintang	0.83	1.00	0.98	0.87	0.92

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
15	Tolikara	0.69	0.83	0.83	0.72	0.77
16	Sarmi	1.2	1.47	1.47	1.3	1.36
17	Keerom	1.28	1.49	1.46	1.29	1.38
18	Waropen	0.91	1.07	1.02	0.89	0.97
19	Supiori	0.45	0.53	0.52	0.46	0.49
20	Mamberamo Raya	0.7	0.86	0.86	0.77	0.80
21	Nduga	0.53	0.63	0.63	0.56	0.59
22	Lanny Jaya	0.79	0.95	0.96	0.85	0.89
23	Mamberamo Tengah	0.51	0.61	0.61	0.53	0.57
24	Yalimo	0.53	0.64	0.64	0.57	0.60
25	Puncak	0.61	0.73	0.72	0.63	0.67
26	Dogiyai	0.57	0.69	0.68	0.59	0.63
27	Intan Jaya	0.56	0.65	0.64	0.55	0.60
28	Deiyai	0.6	0.72	0.72	0.63	0.67
29	Jayapura	14.38	16.87	15.98	13.9	15.28

Sumber : Laporan Analisis Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, 2022

Wilda Sri Munawaroh Harahap, Bastari Mathon, dan Widia Astuty (2018) mengungkapkan Produk Domestik Bruto, dan Suku Bunga memberi pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Selain itu Syahputri, Rahmah Intan (2020) membuktikan bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH). Hal ini juga diperkuat oleh Ai Nety Sumidartini (2017), yang mengungkapkan bahwa jumlah tingkat suku Bunga signifikan terhadap penerimaan pajak, dimana semakin tinggi tingkat suku Bunga, maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Pada Desember 2022, Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, suku bunga pinjaman dan simpanan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman meningkat sebesar 4 basis poin dari bulan sebelumnya menjadi 9,15%, menurut data. Selain itu, suku bunga deposito berjangka naik pada Desember 2022 untuk semua tenor, termasuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, masing-masing sebesar 3,96%, 4,19%, 4,17%, 4,71%, dan 5,11%. Mereka dilaporkan di 3,70%, 3,77%, 3,88%, 4,36%, dan 4,91% setelah November 2022.

Dengan kondisi likuiditas perbankan saat ini, kebijakan menaikkan suku bunga relatif terbatas. Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan moneter sebesar 200 basis poin menjadi 5,50% antara Agustus dan Desember 2022. Menaikkan suku bunga merupakan langkah front-loaded, preventif, dan proaktif untuk membawa inflasi inti kembali ke sasaran 3,0 1% sebelumnya, khususnya pada paruh pertama tahun 2023, dan untuk menekan inflasi. Strategi kenaikan suku bunga tersebut juga sebagai dampak penguatan dolar AS dan tingginya tensi pasar keuangan global, serta meningkatnya permintaan ekonomi domestik yang masih kuat, hal ini dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. dan menyelaraskannya dengan nilai intrinsiknya. Suku bunga di Indonesia meningkat sebesar 223 basis poin menjadi 5,02% pada akhir Desember 2022 dibandingkan akhir Juli 2022 sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan rencana Bank Indonesia untuk memperkuat operasi moneter.

Setelah meningkat 9,4% pada bulan sebelumnya, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dilaporkan mencapai Rp7.925,5 triliun pada Desember 2022, atau tumbuh 9,3% year over year. dimana pertumbuhan DPK terutama dipengaruhi oleh perlambatan giro korporasi dan tabungan individu. Tabungan meningkat sebesar 7,4% (yoy) pada Desember 2022 setelah meningkat sebesar 8,0% (yoy) pada November 2022. Sebaliknya, deposito berjangka meningkat 2,6% (yoy) pada bulan laporan setelah meningkat sebesar 2,4% (yoy) bulan sebelumnya sesuai dengan perubahan suku bunga deposito berjangka. Masih longgarnya likuiditas di sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan membantu penyaluran kredit dan pemulihan ekonomi. Pada Desember 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tetap tinggi yaitu mencapai 31,2%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan bagi dunia usaha. Rasio AL/DPK

menunjukkan risiko likuiditas perbankan yang minimal dan kecukupan likuiditas yang tinggi. Dalam rangka meredam berbagai risiko yang terkait dengan kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak global serta menjaga ketahanan sistem perbankan, upaya menjaga stabilitas sistem perbankan akan terus diperkuat di masa mendatang.

Sri Retnowati (2014) menganalisis pola hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 1980-2012. Dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa terdapat pola kausalitas antara pengeluaran pemerintah pusat dengan penerimaan pajak dalam negeri. Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020) mengungkapkan bahwa secara empiris telah dibuktikan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut penelitian lebih lanjut, pendapatan pajak akan bereaksi dengan baik terhadap guncangan pengeluaran pemerintah. Namun, efek kejutan bervariasi untuk kedua faktor tersebut. Berbeda dengan guncangan terhadap PDB yang memerlukan jeda waktu, reaksi penerimaan pajak akan terjadi secara instan dalam suatu pengeluaran pemerintah.

Sampai saat ini setidaknya ada empat teori yang berusaha menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, yaitu: hipotesis pengeluaran pajak, hipotesis belanja pajak, sinkronisasi fiskal, dan pemisahan kelembagaan. Argumen hipotesis pengeluaran pajak diajukan oleh Peacock dan Wiseman pada tahun 1979 (dalam Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R., 2020) mendasarkan teori mereka pada gagasan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak tertentu, yaitu titik di mana orang dapat memahami tingkat perpajakan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membayar pengeluaran. Oleh karena itu, orang lebih bersedia membayar pajak ketika mereka menyadari bahwa pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai operasinya..

Pemerintah menyusun kebijakan fiskal strategis dengan kerangka ekonomi makro 2022, dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Untuk melawan tren penurunan kemiskinan dan mengambil tindakan, pemerintah akan melanjutkan program pro-poor dan pro-tenaga kerja. Sebelum pandemi 2020, pemerintah akan terus meningkatkan program jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan berdasarkan capaian lima tahun sebelumnya.

Anggaran APBN tahun 2022 menyisihkan Rp1.846.136,7 miliar untuk penerimaan negara. Penerimaan pajak, yang diperkirakan mencapai total Rp 1.510.001,2 miliar, terutama akan digunakan untuk mendanai target penerimaan negara tahun 2022. Sebelum pandemi, perpajakan meningkat rata-rata 7,3 persen setiap tahun selama tahun 2017 hingga 2019, dengan penggerak utamanya adalah aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Penerimaan pajak, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dunia dan perdagangan internasional, mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang hadir sejak awal tahun 2020 dan menyebabkan kontraksi ekonomi baik global maupun domestik. Penerimaan pajak tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp 1.510.001,2 miliar karena tren kenaikan pajak diantisipasi akan terus berlanjut. Sasaran pajak dibagi menjadi dua bagian: (a) penerimaan pajak sebesar Rp1.265.000,0 miliar yang terutama dipengaruhi oleh pemulihan sektor bisnis dan reformasi perpajakan; dan (b) penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp245.001,2 miliar yang antara lain dipengaruhi oleh perubahan tarif cukai dan potensi perluasan basis cukai.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua pada tahun 2011-2021?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak pada tahun 2011-2021?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah (belanja Daerah) terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua pada tahun 2011-2021?

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Indonesia, dengan berfokus pada Kantor DJP, BPS dan Kantor Bank Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran tentang GDP, Suku Bungan dan Tabungan. Dimana umumnya kegiatan penelitian kuantitatif menggunakan data yang dikumpulkan dalam bentuk angka – angka seperti data Penerimaan Pajak, GDP, Suku Bungan dan Tabungan.

2. Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder dari Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, serta data penghasilan perkapita/*Gross Domestic Product (GDP)* masyarakat di Provinsi Papua dari tahun 2011 – 2021 dari Biro Pusat Statistik, dan data Saving di Jayapura dari tahun 2011-2021 dari Bank Indonesia

Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Bahan Pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks–teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi, pemerintahan dan lain-lain. pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto dan sebagainya. sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. Pengumpulan data didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Jayapura dengan mengumpulkan data penerimaan pajak dari tahun 2011-2021, serta mengumpulkan data tambahan pendapatan penghasilan masyarakat pada Provinsi papua melalui kanal situs Kantor Statistik Provinsi Jayapura dan data Kurs Suku Bunga Bank Indonesia.

3. Metode Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GDP, Suku Bunga dan Saving terhadap penerimaan Pajak. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi lebih dari dua variabel yang perhitungannya menggunakan E-Views 8. Regresi dilakukan terhadap enam variabel, yaitu satu variabel dependen (*dependent variable*) dan lima variabel independen (*independent variable*).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam mengintepresentasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam bentuk tabulasi, tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik (Winamo, 2015).

- a) Mean adalah rata-rata data, yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data.

- b) Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap) bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier, terutama bila dibandingkan dengan mean.
- c) Max dan Mix adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data.
- d) Std. Dev (standard deviation) adalah ukuran dispersi atau penyebaran data.
- e) Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean.
- f) Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi.
- g) Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan apabila datanya bersifat normal.

1) Uji asumsi klasik

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winamno, 2015).

Uji multikolineraitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan kolerasi antara variabel independen yang kuat atau tinggi. Cara mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan melihat apakah dua variabel independen memiliki nilai matrix korelasi lebih dari 0,85.

- Nilai korelasi $> 0,85$ maka terdapat Multikolinearitas.
- Nilai korelasi $< 0,85$ maka tidak terdapat Multikolinearitas (Widarjono, 2013).

b. Heterokedositas

Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteskedastisitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Widarjono, 2013).

Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai residual mutlakny. Apabila nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ (5%), maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji *Glejser* adalah uji yang dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi data pada masa- masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan otokorelasi dijumpai di satu yang bersifat antar objek (cross section) (Widarjono, 2013).

Cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan melakukan uji Lagrange Multiplier Test (LM). Melihat ada tidaknya autokorelasi pada uji Lagrange Multiplier Test (LM), jika $Obs^* R\text{-Squared} < \text{nilai tabel}$ maka model regresi dikatakan tidak terkena masalah autokorelasi. Selain itu dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-squares, jika nilai probabilitas chi-squares $> \text{nilai alpha } (\alpha) 0,05$ yang dipilih, maka dapat dikatakan model tidak terkena masalah autokorelasi

d. Normalitas

Salah satu asumsi dianalisis statistika adalah data berdistribusi normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah berdistribusi normal, apabila analisis melibatkan 3 variabel, maka diperlukan data sebanyak $3 \times 30 = 90$. Meskipun demikian, untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque- Bera.¹⁰³

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Rumus yang digunakan adalah:

Dengan H_0 pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera didistribusi dengan X^2 dengan derajat bebas (degree of freedom) sebesar 2. Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera. melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis nol. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal apabila :

- Jika Probabilitas *Jarque-Berra* $< \alpha$ ($\alpha = 0.05$) maka data tidak terdistribusi normal.
- Jika Probabilitas *Jarque-Berra* $> \alpha$ ($\alpha = 0.05$) maka data terdistribusi normal.

2) Analisis Regresi Berganda

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi lancar berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:

$$PJK_t = \beta_0 + \beta_1 BIRatet + \beta_2 BLJDR_t + \beta_3 PDRB_t + \dots$$

Dimana :

Dimana

PJK = penerimaan pajak,

BIRate = suku bunga, dan

BLJDR = belanja daerah

PDRB = pertumbuhan ekonomi

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Imam Gozali, 2011). Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Suku Bunga dan Pengeluaran Pemerintah) terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak.

4) Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyanto, 2010). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak
- b) Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

b. Uji F

Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh variabel independennya terhadap variabel dependennya. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat sig α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai Sig < α maka H0 ditolak
- b) Jika nilai Sig > α maka H0 diterima

5) Definsi Operaasional

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk menawarkan warganya berbagai barang ekonomi. Kapasitas ini meningkat sejalan dengan perubahan filosofi, teknologi, dan kebijakan nasional. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua periode 2011-2021.
2. Suku Bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat suku bunga sebagai harga dapat juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu Rupiah sekarang dengan satu Rupiah nanti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Pertumbuhan Suku Bunga di Provinsi Papua periode 2011-2021.
3. Pengeluaran Pemerintah adalah semua kewajiban daerah yang dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang berlaku disebut sebagai belanja daerah. Dalam anggaran satu tahun, "belanja daerah" mengacu pada semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang menurunkan ekuitas dana berjalan dan yang tidak akan diganti oleh daerah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Pertumbuhan tabungan periode 2011-2021.
4. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Pertumbuhan penerimaan pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengujian Uji Asumsi Klasik**

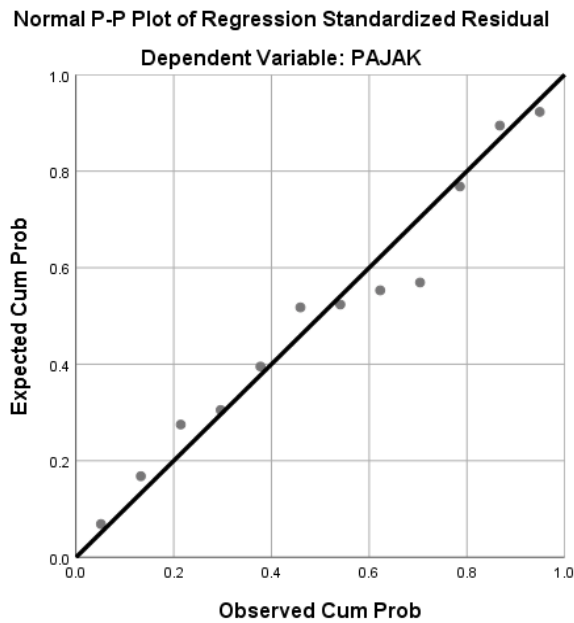
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh dari variabel BIRate, BLJDR dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua. Sebelum melakukan uji hipotesis maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel terjamin kelayakannya sebelum menjadi objek penelitian. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25.

Menurut Foster dkk. (2006) ada tiga asumsi yang perlu dipenuhi untuk melakukan analisis regresi yaitu distribusi normal, linieritas hubungan dan homoskedastisitas (homoscedastic). Tulisan berikut ini akan menjelaskan pengertian dan prosedur memverifikasi asumsi homoskedastisitas. Karena bersifat pengenalan maka banyak dilakukan penyederhanaan dalam pemaparan konsepnya.

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



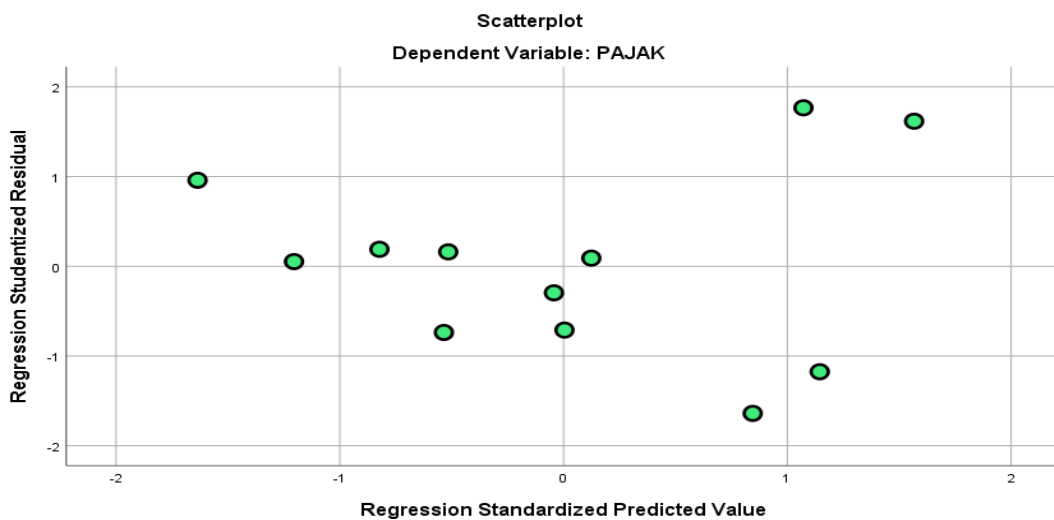
Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas dapat dilihat bahwa data penelitian berdistribusi secara normal. Hal tersebut karena nilai Monte Carlo Signifikansi sebesar 0,257 atau lebih besar dari 0,05 sehingga uji normalitas terpenuhi.

2) Homoskedastisitas

Residu adalah variabel tidak diketahui sehingga diasumsikan bersifat acak. Karena diasumsikan acak, maka besarnya residu tidak terkait dengan besarnya nilai prediksi. Selain itu, Residu adalah nilai kuantitatif yang tidak dapat dijelaskan oleh model/persamaan regresi. Di sisi lain homoskedastisitas adalah kondisi ketika nilai residu pada tiap nilai prediksi bervariasi dan variasinya cenderung konstan.

Gambar 2



Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan output Scatterplots di atas maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dengan demikian dapat kita disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat memenuhi syarat homoskedastis.

3) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya adanya hubungan yang kuat diantara beberapa atau semua variabel prediktor dalam model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun jika ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Untuk melihat adanya multikolinieritas dalam model penelitian yakni dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Model penelitian terbebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 3. X Hasil Uji Multikolinieritas Antar Sesama Variabel Bebas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
BRate	0.524	1.909
BLJDR	0.160	6.240
PDRB	0.127	7.867

Sumber : Hasil Pengolahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance masing-masing variabel BRate (0,524), variabel BLJDR (0,160), dan PDRB (0,127) lebih kecil dari 1. Sedangkan nilai VIF dari ketiga variabel BRate (1,909), variabel BLJDR (6.240), dan PDRB (7.867)yang mana lebih kecil atau kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan masalah lain yang timbul bila kesalahan tidak sesuai dengan batasan yang disyaratkan oleh analisis regresi. Autokorelasi hanya terjadi jika menggunakan data kurun waktu (*time series*) dan ditandai oleh pola kesalahan yang beruntun. Pengujian ada tidaknya autokorelasi pada nilai residual dapat dilihat melalui statistik *Durbin-Watson* (D-W).

Tabel 4. Hasil Uji Durbin-Watson

Model	D-W	Keterangan
1	2.285	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output program SPSS diperoleh nilai D-W hitung yaitu sebesar 2,285, angka ini terletak diantara -2 dan +2. Dari pengamatan ini disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif dalam penelitian ini

5) Uji Hipotesis menggunakan kriteria Statistik

1. Uji Pengaruh Parsial

Uji t digunakan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel terikat. Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (one tail test).

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Hasil dari regresi menampilkan nilai t_{hitung} atau $t_{statistik}$, nilai ini dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Hasil pengujian dari persamaan model regresi pada tabel dibawah ini menunjukkan nilai batas kritis untuk pengujian t statistik dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji-t pada Model

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel} $\alpha = 10\%$	Uji-t	H_0	Keterangan
Constant	1.842	1,859	<	Diterima	Tidak Signifikan
Birate	-2.334	1,859	>	Ditolak	Signifikan
BLJDR	3.298	1,859	>	Ditolak	Signifikan
PDRB	-1.737	$\pm 1,859$	<	Diterima	Tidak Signifikan

Sumber : data diolah, 2022

Pengujian estimasi terhadap parameter-parameter secara parsial dilakukan dengan uji-t. Berikut dibawah ini merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai t_{tabel} .

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= t [\alpha ; df (n - k)] \\
 &= t [0,10 ; df(11 - 5)] \\
 &= t [0,10 ; df(6)] \\
 &= 1,859
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui nilai t_{tabel} adalah 1,859. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada masing-masing variabel independen hasil estimasi.

- a. Uji t-statistik Variabel Birate

Hipotesis pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Nilai BRate tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Nilai BRate berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung untuk ekspor sebesar -2.334, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,859 pada $\alpha = 5\%$. Jadi thitung > ttabel (-2.334 > 1,859). Dari pengujian ini diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BRate berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial, ceteris paribus.

b. Uji t-statistik Variabel BLJDR

Hipotesis pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Nilai BLJDR tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Nilai BLJDR berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung untuk BLJDR sebesar 3.298, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,859 pada $\alpha = 5\%$. Jadi thitung > ttabel (3.298 > 1,859). Dari pengujian ini diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BLJDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial, ceteris paribus

c. Uji t-statistik Variabel PDRB

Hipotesis pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Nilai PDRB tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Nilai PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung untuk PDRB sebesar 3.298, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,859 pada $\alpha = 5\%$. Jadi thitung > ttabel (3.298 > 1,859). Dari pengujian ini diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BLJDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial, ceteris paribus

2. Uji Hipotesis menggunakan kriteria Statistik

a. Uji Pengaruh Parsial

Uji t digunakan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel terikat. Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (one tail test).

Apabila thitung < ttabel, maka H_0 diterima. Hasil dari regresi menampilkan nilai thitung atau tstatistik, nilai ini dibandingkan dengan nilai ttabel. Hasil pengujian dari persamaan

model regresi pada tabel dibawah ini menunjukkan nilai batas kritis untuk pengujian t statistik dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji-t pada Model

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel} $\alpha = 10\%$	Uji-t	H_0	Keterangan
Constant	1.842	$\pm 1,859$	<	Diterima	Tidak Signifikan
BIrate	-2.334	$\pm 1,859$	>	Ditolak	Signifikan
BLJDR	3.298	$\pm 1,859$	>	Ditolak	Signifikan
PDRB	-1.737	$\pm 1,859$	<	Diterima	Tidak Signifikan

Sumber : data diolah, 2022

Pengujian estimasi terhadap parameter-parameter secara parsial dilakukan dengan uji-t. Berikut dibawah ini merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai t_{tabel} .

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= t [\alpha ; df (n - k)] \\
 &= t [0,10 ; df(11 - 5)] \\
 &= t [0,10 ; df(6)] \\
 &= 1,859
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui nilai t_{tabel} adalah 1,859. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada masing-masing variabel independen hasil estimasi.

1) Uji t-statistik Variabel BIrate

Hipotesis pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Nilai BIrate tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Nilai BIrate berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} untuk ekspor sebesar -2.334, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,859 pada $\alpha = 5\%$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-2.334 > 1,859). Dari pengujian ini diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BIrate berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial, ceteris paribus.

2) Uji t-statistik Variabel BLJDR

Hipotesis pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Nilai BLJDR tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Nilai BLJDR berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung untuk BLJDR sebesar 3.298, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,859 pada $\alpha = 5\%$. Jadi thitung $>$ ttabel ($3.298 > 1,859$). Dari pengujian ini diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BLJDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial, ceteris paribus

3) Uji t-statistik Variabel PDRB

Hipotesis pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Nilai PDRB tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Nilai PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung untuk PDRB sebesar 3.298, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,859 pada $\alpha = 5\%$. Jadi thitung $>$ ttabel ($3.298 > 1,859$). Dari pengujian ini diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BLJDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial, ceteris paribus.

3. Uji Bersama-sama

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh nilai BRate, BLJDR dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak secara simultan. Untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut :

$H_5 : H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

$H_5 : H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$ (paling tidak satu variabel $\neq 0$)

Pengujian estimasi terhadap parameter-parameter secara bersama-sama dilakukan dengan uji F. Berikut dibawah ini merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai Ftabel.

df untuk pembilang (N1) $= k - 1 = 4 - 1 = 3$

df untuk penyebut (N2) $= n - k = 12 - 4 = 8$

Maka :

Ftabel $= F (3 ; 8)$

$= 2,92$

Tabel 7. Hasil Estimasi Model

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Test Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2075497.036	1126986.121		1.842	.103					
BIrate	-167873.735	71925.121	-0.479	-2.334	0.048	-0.678	-0.636	-0.347	0.524	1.909
BLJDR	0.1689	0.051	1.224	3.298	0.011	0.832	0.759	0.490	0.160	6.240
PDRB	-0.0166	0.010	-0.723	-1.737	0.121	0.718	-0.523	-0.258	0.127	7.867

a. Dependent Variable: PAJAK

b. Independent Variable BIrate significant : p-value = 0.048 < 0.05

c. Independent Variable BLJDR significant : p-value = 0.011 < 0.05

d. Independent Variable PDRB non significant : p-value = 0.121 > 0.05

e. No Collinearity : 0 < VIF < 10

Sumber : data diolah, 2022

Berdasarkan hasil regresi seperti pada tabel 5.5 dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut.

$$\text{Penerimaan Pajak} = 2075497.036 - 167873.735 \text{ BIrate} + 0.1689 \text{ BLJDR} - 0.0166 \text{ PDRB}$$

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 12.4432 dengan nilai signifikansi 0,022. Nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 12 dengan tingkat signifikan 0,05 dan k adalah 4, maka nilai F_{tabel} adalah 2,92. Sehingga diperoleh bahwa F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} atau $12.4432 > 2,92$ dan dapat juga dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau $0,022 < 0,05$. Artinya bahwa secara bersama-sama variabel BIrate, BLJDR, dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua pada $\alpha = 5\%$.

4. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kuatnya pengaruh BIrate, BLJDR, dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua dapat dilihat pada koefisien determinasinya yaitu R^2 . Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh nilai R-Square sebesar 0,824 yang berarti 82,4% perubahan Penerimaan Pajak di Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh perubahan nilai BIrate, BLJDR dan PDRB. Sementara sisanya 17,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar keempat variabel independen tersebut.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson (autocorrelation Test)
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.907 ^a	.824	.757	214286.9518654	.824	12.443	3	8	.002	2.285

a. Predictors: (Constant), PDRB, BRate, BLJDR

b. Dependent Variable: PAJAK

Sumber : data diolah, 2022

Sedangkan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada koefisien korelasi (R) yaitu 0,907 atau 90,7%. Hal ini berarti hubungan antara BRate, BLJDR dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak mempunyai hubungan yang cukup kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

Penerimaan Pajak = 2075497.036 - 167873.735 BRate + 0.1689 BLJDR - 0.0166 PDRB:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa BRate memiliki hubungan yang negatif terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua pada tahun 2011-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan/penurunan BRate akan direspon negatif (berlawanan) pada penerimaan pajak di Provinsi Papua. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BRate berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa BLJDR memiliki hubungan yang positif terhadap Penerimaan Pajak pada tahun 2011-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan/penurunan BLJDR akan direspon searah pada penerimaan pajak di Provinsi Papua. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai BLJDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial.
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah (belanja Daerah) terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua pada tahun 2011-2021?
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan yang negatif terhadap Penerimaan Pajak pada tahun 2011-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan/penurunan PDRB akan direspon direspon negatif (berlawanan) pada penerimaan pajak di Provinsi Papua. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa nilai PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua periode 2011-2021 secara parsial.
5. Selain itu, secara bersama-sama variabel BRate, BLJDR, dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Provinsi Papua selama periode 2011-2021. Selain itu hubungan antara BRate, BLJDR dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak mempunyai hubungan yang cukup kuat berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi (R).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono, 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ai Nety Sumidartini (2017) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Transparansi*. Volume 9, Nomor 01, Maret 2017. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Issn 2085-1162
- Bank Indonesia, 2023. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2022*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, 2023. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV Tahun 2022*. Bank Indonesia.
- Duwi Priyatno, 2010. *Paham Analisis Data dengan SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2010)
- Enny Sri Hartati . 2012. *Dampak Komposisi Belanja Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Dan Tingkat Kemiskinan*. Institut Pertanian Bogor Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian.
- Hudiyanto, 1992. *Peranan Pajak dalam Perekonomian Indonesia*. UNISIA, No.15 Tahun XIII Triwulan IV – 1992.
- Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivaraite dengan program BM SPSS 19, Edisi 5*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011),
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan (dari teori menuju aplikasi)* (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2010), h. 43.
- Kasmir, 2007. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 2023. *Siaran Pers : Stabilitas Sistem Keuangan Terus Membaik Ditopang Optimisme Pemulihan Perekonomian Dan Sistem Keuangan Domestik Dengan Terus Mewaspada Berbagai Risiko Global*. Nomor: 01/KSSK/Pers/2023
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). *Analisi pengaruh realisasi belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak di Indonesia*. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(3), 171- 181.
- Mankiw, N Gregory, 1997, *Macroeconomics*, Worth Publisher Inc, New York.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit : BPFE, Yogyakarta.
- Meita Djohan, 2010. *Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia PRANATA HUKUM* Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010
- Nungki Yartono dan Desna Azizah, 2020. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Negara*. Universitas Nasional
- Novinta Nurmasari dan Zainal Arifin, 2017. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto Dan Suku Bunga Terhadap Foreign Direct Investment Di Indonesia Tahun 1997 – 2016*.
- Nugroho, dkk. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. *Profita* Edisi II, Oktober 2010.
- Nugroho, R. E. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Banten*. *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)*, 10(1).
- Riza Faryana, 2019. *Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional Dan Kewajiban Pajak Di Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/337077774>
- Setyayunda Putri Malinda, 2016. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, Dan Performa Ekonomi Terhadap Pendalaman Sektor Keuangan (Financial Deepening) Di Indonesia Periode 2006.Q1-2015.Q4*.

- Setyowati, M. S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4.
- Syahputri, Rahmah Intan (2020) Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Direktorat Jendral Pajak. Skripsi thesis, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA.
- Sri Retnowati, 2014. Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 1980 -2012. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wing Wahyu Winarno, 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan E-Views edisi-4 (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2015).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A9991);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Wilda Sri Munawaroh Harahap, Bastari Mathon, Widia Astuty, 2018. Melakukan penelitian tentang Analisis faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiah (APPPTMA) ISBN: 978-623-90018-0-3.
- Wagner, A. (1883). *Finanzwissenschaft* (3rd ed.). Leipzig. Partly reprinted in Richard A. Musgrave and Alan T. Peacock, eds. (1958), *Classics in the Theory of Public Finance*. London: Macmillan.